

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana “Prodamas” dalam Mewujudkan *Good Government Governance* di Tingkat Kelurahan Pemerintahan Kota Kediri

Wiwiek Kusumaning Asmoro
Politeknik Negeri Malang
PSDKU Kediri
Kediri, Indonesia
wiwikasmoro@gmail.com

Novie Astuti Setianingsih
Politeknik Negeri Malang
PSDKU Kediri
Kediri, Indonesia
viyecoll@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Prodamas terhadap *Good Government Governance*. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Prodamas merupakan upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban terutama di tingkat kelurahan, karena kelurahan merupakan penerima dan pengelola dana Prodamas untuk kegiatan pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi-Sosial. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode survey. Populasi pada penelitian ini adalah 46 kelurahan di Pemerintahan Kota Kediri dengan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *area sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner yang diberikan kepada aparaturnya kelurahan, dan pihak Rukun Tetangga (RT) sebagai pelaksana kegiatan Prodamas. Penelitian menunjukkan hasil korelasi terdapat hubungan yang kuat atas variabel transparansi, akuntabilitas dan *Good Government Governance*. Berdasarkan hasil penelitian, maka tata kelola dana Prodamas di tingkat Kelurahan Pemerintahan Kota Kediri adalah baik karena telah akuntabel dan transparan dalam pengelolaan dana.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Dana Prodamas, *Good Government Governance*

I. PENDAHULUAN

Prodamas menurut Peraturan Walikota Kediri No. 40 Tahun 2014 merupakan program dari Pemerintah Kota Kediri yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat ditingkat kelurahan yang berbasis di wilayah Rukun Tetangga sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sosial kemasyarakatan.

Pemberian dana Prodamas ini mempunyai tujuan utama adalah upaya percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Kediri. Pemerintah Kota Kediri

memberikan dana sebesar Rp.50 Juta kepada setiap RT, dengan komposisi pembangunan 60% untuk bidang Infrastruktur (fisik), 40% bidang Ekonomi dan Sosial. Program Prodamas adalah disebut juga dengan program Rp. 50 juta pertahun tiap Rukun Tetangga (RT) di era tahun 2015 sampai 2018. Saat ini Prodamas mengalami peningkatan yaitu sebesar 100 juta pertahun yang disebut dengan “Prodamas Plus” di tahun 2019 yang akan di fokuskan pada peningkatan kesehatan dan pendidikan. (Radar Kediri, 2018)

Kota Kediri terdapat tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Kota, Kecamatan Mojoroto dan Kecamatan Pesantren. Berikut adalah jumlah data Kelurahan, Rukun Warga (RW) dan Rukun

Rukun Tetangga (RT) pada masing-masing kecamatan. Keseluruhan berjumlah 46 di tingkat Kelurahan, 319 di tingkat RW dan 1395 di tingkat RT. Jika dana Prodamas diberikan Rp. 50 juta di tiap-tiap RT yang berjumlah 1395 unit satuan kerja, maka total dana yang dikucurkan oleh Pemerintah Kota Kediri adalah berjumlah Rp. 69.750.000.000,- (Enam Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Meskipun hibah tersebut untuk RT, namun faktanya mereka tak memiliki kewenangan mengelola anggaran. Seluruh bantuan tersebut dikelola dan dilaksanakan oleh Kelurahan berdasarkan usulan dari RT. Usulan warga ini kemudian ditindaklanjuti oleh pendamping untuk penyusunan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) dan pelaksanaannya, dengan ketentuan tetap melibatkan Ketua RT dan tokoh masyarakat dalam proses belanja barang, (Tempo, 2017). Kucuran dana Prodamas yang tidak sedikit tentu saja sangat rawan untuk penyelewengan sehingga di perlukan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana pada pihak-pihak penerima dan pengguna dana guna terwujudnya *Good Government Governance*. Akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan dana Prodamas kepada masyarakat. Transparansi yaitu terbukanya akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana Prodamas. Kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan dana dimana tanggung jawab utamanya adalah pada Kelurahan

Mengingat pentingnya dana Prodamas yang dikucurkan tidak sedikit, maka Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Prodamas sangat diperlukan guna terwujudnya *Good Government Governance*, maka peneliti merumuskan “Apakah terdapat hubungan antara penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Prodamas terhadap *Good Government Governance* di tingkat Kelurahan Pemerintahan Kota Kediri. Alasan pemilihan kasus di Kelurahan karena kelurahan merupakan penerima dan mengelola dana Prodamas untuk kegiatan pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi-Sosial.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntabilitas

Akuntabilitas disebut dengan *accountability* yang bisa diartikan dengan “yang dapat dipertanggungjawabkan”, atau dalam kata sifat disebut *accountable*. Banyak yang mengidentikkan *accountability* dan *responsibility*, secara umum *responsibility* adalah tugas yang diberikan atasan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas kewajibannya (Susanto, 2015)

Albugis (2017) Manfaat akuntabilitas upaya perwujudan sistem akuntabilitas pada organisasi dimaksudkan untuk:

1. Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi
2. Mendorong terciptanya transparansi dan *responsiveness* organisasi.
3. Mendorong partisipasi masyarakat.
4. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, ekonomis dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
5. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja.
6. Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin.
7. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Menurut Hopwood dan Tomkins (1984) dan Elwood (1993) dalam Susanto (2015) dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi yaitu:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran.
2. Akuntabilitas Manajerial.
3. Akuntabilitas Program.
4. Akuntabilitas Kebijakan.
5. Akuntabilitas Finansial.

2.2. Transparansi

Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. (SAP, 2010). Transparansi adalah keterbukaan antara pemegang keputusan dengan para pemegang

kepentingan untuk mendapatkan akses yang sama mengenai informasi sumber daya dan dana yang didapatkan dan digunakan oleh suatu organisasi. Transparansi memudahkan bagi masyarakat atau pemegang kepentingan untuk mencari informasi terkait kebijakan pemegang keputusan. (Lukito,2014). Karakteristik transparansi yang harus diperhatikan adalah:

1. *Informativeness* (informatif).

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

2. *Openess* (keterbukaan).

Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain dari informasi yang dikecualikan yang diatur oleh Undang-Undang.

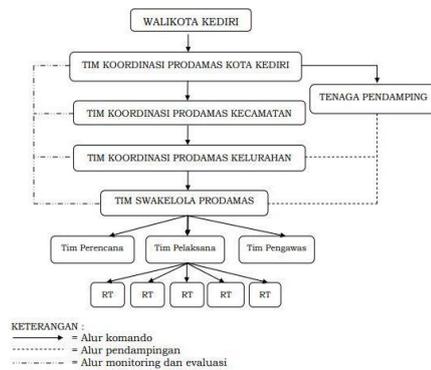
3. *Disclosure* (pengungkapan)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik atas aktivitas dan kinerja finansial. Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas.

2.3. Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas)

Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) adalah suatu program dari pemerintah Kota Kediri yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat ditingkat kelurahan yang berbasis di wilayah Rukun Tetangga (RT) sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sosial kemasyarakatan. (Prodamas, 2015). Berikut adalah bagan alur struktur pelaksanaan Prodama menurut Peraturan Walikota Kediri No. 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitas

Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) :



Gambar1.Bagan Alur Struktur Pelaksanaan Prodamas

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan prodamas setiap RT sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) per tahun dan dialokasikan melalui Belanja Langsung yang dituangkan dalam kode rekening belanja program dan kegiatan dalam RKA/DPA SKPD kelurahan yang terinci per-RT dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bidang infrastruktur/lingkungan

Digunakan untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasa-rana umum minimal 60% (enam puluh persen) dari pagu dana Prodamas dalam skala kecil dan non bantuan langsung tunai yaitu antara lain: Jembatan kecil/gorong-gorong, Pengerasan jalan skala kecil, Semenisasi jalan gang/lorong, Pembuatan dan atau perbaikan selokan/drainase lingkungan (parit). Pengecualian dari ketentuan minimal 60% bagi kegiatan bidang infrastruktur adalah untuk lingkungan RT yang sarana dan prasarana infrastrukturnya telah terpenuhi.

2. Bidang Ekonomi

Kegiatan bidang ekonomi digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana ekonomi untuk kelompok usaha bersama dalam skala kecil dan non bantuan langsung tunai, yaitu:

- a. Penyediaan sarana dan pra-sarana pendukung usaha ekonomi kerakyatan
- b. Pelatihan berbagai jenis ke-trampilan usaha dalam skala kecil
- c. Pengadaan bibit tanaman sa-yuran dan palawija, bibit ter-nak dan benih ikan dalam skala kecil

3. Bidang Sosial

Kegiatan bidang sosial digunakan untuk penyelesaian permasalahan sosial dan peralatan pendukung kegiatan sosial di masyarakat dalam skala kecil dan non bantuan lang-sung tunai, yaitu:

- a. Pemberian santunan bantuan makanan kepada penduduk miskin lanjut usia dalam skala kecil
 - b. Peralatan kegiatan seni dan budaya lokal dalam skala kecil
 - c. Peralatan kegiatan bulan bakti gotong-royong masya-rakat ditingkat RT
 - d. Peralatan kegiatan keagama-an dan peringatan hari besar nasional (PHBN) ditingkat RT
 - e. Peralatan kegiatan pertemu-an-pertemuan ditingkat RT
4. Bidang Operasional
- a. Biaya operasional untuk kegiatan Prodama di kelurahan dialokasikan anggaran tersendiri di masing-masing SKPD kelurahan
 - b. Biaya operasional untuk tim koordinasi Prodama tingkat Kota dan tenaga pendamping dialokasikan anggaran tersendiri pada SKPD kantor pemberdayaan masyarakat
 - c. Besaran alokasi biaya opera-sional sebagaimana dimak-sud ditentukan untuk kelurahan sekota Kediri maksimal 5,5% (lima koma lima persendari pagu anggaran Pro-dama se- Kota Kediri

2.4. Good Government Governance

Menurut Thomas (dalam Rompas,dkk , 2010) *Good Governance* merupakan tuntutan imperatif, yang harus dilaksanakan, terutama dengan berlangsungnya kompetisi ekonomi global yang semakin ketat. Bila *good governance* tidak menjadi kerangka acuan dalam praktek penyelenggaraan pemerintah, maka negara itu akan tetap berada di posisi pinggiran (*periphery*) dan selalu tergantung dengan negara lain, karena *good governance* identik dengan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) ditingkat global dan berkembangnya masyarakat sipil.

Good Government Governance sering diartikan sebagai kepermerintahan yang baik. *Good Government Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang

efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. *Good Government Governance* lebih terfokus pada sektor publik yang bersinergis untuk mengelola suatu Negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik secara efektif dan efisien dengan menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menghindari kepentingan pribadi yang akan merugikan masyarakat luas. (Sulistiyani,2017)

Kepemerintahan harus mampu menjalankan pelayanan yang baik, dan disebut sebagai "*good governance*" di tandai dengan tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya, ketiga pilar dimaksud adalah (Sedarmayanti, 2012):

1. Transparansi (Keterbukaan)
2. Partisipatori (Peran serta masyarakat)
3. Akuntabilitas (Terukur semua kinerja pemerintahan)

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat di samping adanya pengaruh globalisasi.. Oleh karena itu tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

2.3. Pengembangan Hipotesa

Menurut penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Gayatri dan Ni luh (2017) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara penerapan tranparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dana desa dan terdapat hubungan yang kuat. Hasil atas variabel transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan keuangan dalam pengelolaan dana desa menunjukkan tatakelola keuangan desa yang baik.

Penelitian diatas sejalan dengan penelitian

Setiawan,dkk (2017) yang menghasilkan akuntabilitas dan transparansi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan *good governance*.

Berdasarkan penelitian terdahulu serta rumusan masalah, maka hipotesa dalam penelitian ini adalah “Terdapat hubungan antara penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Prodamas terhadap *Good Government Governance*”

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Definisi konsep dalam penelitian ini adalah: *pertama*, transparansi yaitu terbukanya akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana Prodamas; *kedua*, akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan dana Prodamas kepada masyarakat; *ketiga*, *Good Government Governance* yaitu kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan dana Prodamas apakah sudah baik atau belum. Penanggung jawab utama pengelolaan dana Prodamas adalah lurah.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah transparansi dan akuntabilitas sedangkan variabel terikatnya adalah *Good Government Governance*. Transparansi dan akuntabilitas dijabarkan dalam empat tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan dan tahap pertanggungjawaban, sedangkan *Good Government Governance* menggunakan indikator kinerja tim pelaksana pengelola dana Prodamas.

Populasi dalam penelitian ini adalah Kelurahan di Pemerintahan Kota Kediri yang berjumlah 46 kelurahan. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *area sampling* yaitu teknik sampling yang dilakukan dengan cara mengambil wakil dari setiap daerah/tilayah geografis yang ada menurut Riduwan (2015). Besarnya sampel yang diambil menggunakan rumus slovin. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan dokumentasi. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah tertutup yaitu responden menjawab

pertanyaan dengan memilih jawaban yang sudah disediakan. Beberapa alternatif jawaban yang terdapat dalam kuesioner kemudian diberikan skor dengan menggunakan skala Likert 5. Jawaban a diberi skor 5, jawaban b diberi skor 4, jawaban c diberi skor 3, jawaban d diberi skor 2 dan jawaban e diberi skor 1.

Teknik pengolahan data dilakukan dalam tiga tahap yaitu: pengeditan, koding, dan tabulasi data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2010). Jawaban dalam pengukuran transparansi pengelolaan dana Prodamas menggunakan skala likert dengan kategori sebagai berikut: tidak transparan (TT) diberi angka 1, kurang transparan (KT) diberi kode 2, cukup transparan (CT) diberi kode 3, transparan (T) diberi kode 4, dan sangat transparan (ST) diberi kode 5. Jawaban dalam pengukuran akuntabilitas pengelolaan dana Prodamas menggunakan skala likert dengan kategori adalah sebagai berikut: tidak baik (TB) diberi kode 1, kurang baik (KB) diberi kode 2, cukup baik (CB) diberi kode 3, baik (B) diberi kode 4, dan sangat baik (SB) diberi kode 5. Kemudian dilakukan penghitungan rata-rata hasil penelitian, menghitung persentase, dan pengujian instrumen penelitian yaitu uji validitas dengan metode korelasi *product moment* dan uji realibilitas dengan metode *alpha cronbach*. Untuk mencari hubungan antara transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Prodamas terhadap *Good Government Governance* digunakan rumus koefisien korelasi *tau kendall*.

$$\Gamma = \frac{\sum s}{\frac{1}{2} n(n-1)}$$

n = Jumlah subyek
 $\sum s$ = Jumlah ranking
 = Koefisien korelasi kendall's tau

Pengujian terhadap koefisien korelasi rangking Kendall's tau menggunakan pendekatan statistic uji z yaitu :

$$z = \frac{\tau}{\sqrt{(4n + 10)/(9n^2 - 9n)}}$$

τ = Harga koefisien korelasi kendall's tau
n = Jumlah sampel

Analisis kolerasi kendall's tau memiliki rentang angka korelasi yang mempunyai interval -1 sampai +1, adalah sebagai berikut:

Angka 0-0,5 = Korelasi lemah
Angka > 0,5 - 0,7 = Korelasi kuat
Angka > 0,7- mendekati 1= Korelasi sangat kuat
Signifikansi hasil korelasi berdasarkan probabilitas :

Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima
Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak

Kaidah pengambilan kesimpulan: Tolak H_0 jika $z > z_{0,025}$ atau berdasarkan probabilitas H_0 ditolak jika $p(z > Z) < \alpha/2$ atau $2.p(z > Z) < \alpha$ untuk uji dua sisi, artinya terdapat hubungan antara penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Prodama terhadap *Good Governance Government*.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pemerintahan Kota Kediri, dengan jumlah kelurahan yang menerima alokasi dana Prodama sebanyak 46 Kelurahan yang tersebar di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Kota, Kecamatan Mojoroto dan Kecamatan Pesantren. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *area sampling*.. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner yang diberikan kepada aparaturnya kelurahan, dan pihak Rukun Tetangga (RT) sebagai pelaksana kegiatan Prodama. Setiap kelurahan disebar 20 kuesioner. Dari 920 kuesioner yang dibagikan, ada 821 kuesioner yang kembali. Kemudian dari jumlah tersebut, seluruh kuesioner diisi secara lengkap, sehingga seluruhnya dapat digunakan dalam analisa data Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi *product moment*. Uji validitas dilakukan terhadap variabel bebas X1, X2 dan Variabel terikat Y. Kriteria keputusan jika validitas hitung > r tabel maka valid.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *alpha cronbach*. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika nilai *alpha Cronbach* > 0,6. Uji reliabilitas terhadap instrumen akuntabilitas pengelolaan dana Prodama (X1) dengan 9 pertanyaan menunjukkan nilai 0,712 > 0,6, terhadap transparansi pengelolaan dana Prodama (X2) dengan 9 pertanyaan menunjukkan nilai 0,826 > 0,6, terhadap *Good Government Governance* (Y) dengan 9 pertanyaan menunjukkan nilai 0,829 > 0,6. Sehingga semua instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

Tabel 1. *Descriptive Statistics*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Rata2_Akuntabilitas	821	2.52	4.76	3.8472	.41992
Rata2_Transparansi	821	2.84	5.00	3.9218	.52381
Rata2_Good Govern	821	3.01	5.00	3.8521	.43262
Valid N (listwise)	821				

Tabel 2. *Correlations*

		Akuntabilitas	Transparansi	Good Government G
Akuntabilitas	Correlation Coefficient	1.000	.586**	.571**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	821	821	821
Kendall's Tau b	Correlation Coefficient	.586**	1.000	.506**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	821	821	821
Good Government G	Correlation Coefficient	.571**	.506**	1.000
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	821	821	821

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pengamatan sebanyak 821 yang telah lolos uji validitas dan uji reliabilitas, diperoleh nilai statistik deskriptif untuk menghitung rata-rata yang disajikan dalam tabel 1.

Hasil penelitian variabel akuntabilitas pengelolaan dana Prodama (X1) dalam 821 responden diperoleh nilai terendah 2.52 dan nilai tertinggi 4.76 sehingga rentang nilai 2.24. Rata-rata diperoleh 3,8472 dengan standar deviasi 0,41992. Hasil penelitian variabel transparansi pengelolaan dana Prodama (X2) diperoleh nilai terendah 2.84 sedangkan nilai tertinggi 5 sehingga rentang nilai 2.16. Rata-rata diperoleh 3,9218 dengan standar deviasi 0,52381. Hasil penelitian variabel *Good Government Governance* (Y) diperoleh nilai terendah 3,01 dan nilai tertinggi 5 sehingga

rentang nilai 1,99. Rata-rata diperoleh 3,8521 dengan standar deviasi 0,43262. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan korelasi kendall's tau atau uji z dengan taraf signifikansi 5%. Berdasarkan atas hasil analisis dalam tabel 2 menunjukkan terdapat hubungan antara penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Prodama terhadap *Good Governance Government* dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga hipotesis diterima. Untuk melihat keeratan hubungan antar variabel dibuktikan dengan nilai *correlation coefficient* terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana Prodama adalah 0,586 dan 0,571, variabel transparansi pengelolaan dana Prodama adalah 0,586 dan 0,506, dan variabel *Good Government Governance* sebesar 0,571 dan 0,506. Rentang angka korelasi antara 0,5 sampai 0,7 menunjukkan hubungan yang kuat diantara variabel.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan pada penelitian ini bahwa terdapat hubungan antara penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Prodama terhadap *Good Government Governance*. Hasil korelasi menunjukkan terdapat hubungan yang kuat atas variabel transparansi, akuntabilitas dan *Good Government Governance*. Berdasarkan hasil penelitian, maka tata kelola dana Prodama di tingkat Kelurahan Pemerintahan Kota Kediri adalah baik karena telah akuntabel dan transparan dalam pengelolaan dana Prodama. Penyebaran kuesioner pada penelitian ini terbatas pada pihak pengelola Prodama di kelurahan dan RT saja. Penyebaran kuesioner tidak dilakukan terhadap warga yang merasakan dampak dari kegiatan Prodama yaitu berupa program fasilitas yang diberikan guna peningkatan sosial, ekonomi dan infrastruktur pada daerah warga tersebut. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah dapat diperluas dengan melakukan penyebaran kuesioner terhadap warga sekitar sehingga dapat dibuat suatu generalisasi atas penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Prodama atau dana hibah pemerintah daerah lainnya guna mengetahui tingkat *Good Government Governance* di pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Dwiyanto. 2006. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Albugis, Febriana F. 2016 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA, Vol.4, No.2 Tahun 2016*.
- Gayatri, Made Yeni Latrin; Ni Luh Sari Widhiyani. 2017. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Vol. 10 No. 2 Agustus 2017*
- Lukito, Penny, Kusumastuti. 2014. *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi Ke depan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Prodama, 2015, *Buku Saku Program Pemberdayaan Masyarakat, Kota Kediri Peaturan Walikota Kediri, 2015, Pedoman Pelaksanaan Pro-gram Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (Prodama)*. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Kediri
- Perwali Nomor 40 Tahun 2014 Kota Kediri tentang *Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Kediri 2015*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan
- Pemerintah Kota Kediri. 2015. *Data Kecamatan dan Kelurahan Kota Kediri*. (Online): <https://kedirikota.go.id/halaman/kelurahan>. Diakses tanggal 20 Juni 2018.
- Radar Kediri, Jawa Pos. 2018. *Pemkot Siapkan Tambahan Tiga Bidang Prodama Plus*. (Online): <https://radarkediri.jawapos.com/read/pemkot-siapkan-tambahan-tiga-bidang-prodama-plus>. Diakses tanggal 2 Agustus 2018
- Riduwan (2015). *Dasar-Dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta

-
- Rompas;Tomo;Dasril Munir.2010. *Kreasi Good Governance Suatu Eksoterik Mutlak*. Jakarta Pusat: Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia
- Sugiyono. 2010. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA
- Sugiyono.2012. *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Bandung : ALFABETA
- Susanto, Hari. 2015. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Pada Pnpm Mandiri Perdesaan Di Kabupaten Situbondo. *Tesis*. Universitas Jember.
- Sulistiani, Dwi. 2017. Good Government Governance Menuju Pemerintah yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). *Jurnal El-Muhasaba, Vol. 8, No. 1*, Januari 2017
- Setiawan MW, Atmajaya AT, Sulindawati. 2017. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Vol.7,No.1*. Universitas Pendidikan Ganesha
- Sedarmayanti 2012. *Good Government Governance (Kepemerintahan yang baik) dan Good Corporate Governance*. Bandung: Mandar Maju
- Tempo. Co. 2017. *Audit Lemah, Program Rp50 Juta per RT Dinilai Rawan Bocor*.(Online):<https://nasional.tempo.co/read/903385/audit-lemah-program-rp50-juta-perrrtdinilairawanbocor/full&view>. Diakses 2 Agustus 2018